ABSTRAK

Sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niat para pelaku kejahatan. Keras serta tak pandang bulu dalam penjatuhan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi. Namun, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali yang dijatuhi dengan sanksi berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi yang ada tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Tidak sedikit juga koruptor yang dimanjakan oleh hakim dengan putusan dan sanksi pidana yang ringan. Penulisan yang berjudul "Pemberatan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi" bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Kasus perkara dengan nomor register 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo sistem konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dijatuhi dengan cara minimum khusus dan maksimum khusus dengan pembuktian yang ditemukan selama persidangan tingkat banding. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor register No.4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo dengan penjatuhan putusan berdasarkan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta beberapa pertimbangan putusan berdasarkan nurani hakim yang dianggap apa yang diatur dalam Undang-Undang kurang sesuai dengan kondisi terdakwa yang dimana selama dalam muka persidangan telah ditemukannya beberapa fakta baru dengan barang bukti yang baru serta pertimbangan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia akibat dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Pemberatan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Severe sanctions will make the perpetrators of crime become afraid, so discourage the perpetrators of crime. Hard and indiscriminate in imposing criminal sanctions, should be a doctrine in the strategy to eradicate corruption. However, so far only very few have been given heavy sanctions. Evidently, not a few cases of corruption that have not been decided with the maximum sentence by the judge. Not a few corruptors are spoiled by the judge with a ruling and mild criminal sanctions. The writing entitled "Imposition of Criminal Sanctions on Corruption Actors" aims to: 1) To find out the construction of criminal provisions and the criminal system in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 Year 2001; and 2) To analyze the judges' considerations in giving criminal sanctions to be more severe for perpetrators of corruption in decision number 4 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT.DKI.

The method used in this study is the normative juridical method. The normative legal research method is a scientific research procedure to find the truth based on the legal scientific knowledge of the normative side. The research specification used is descriptive analysis, namely research that aims to provide an overview of the problems that occur in connection with using applicable laws and regulations and relevant theories are then collected through data collected, processed, and arranged in theory to get problem solving according to applicable regulations.

The results of this paper show that: 1) Case case with register number 4 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT.DKI with the defendant Johanes Budisutrisno Kotjo construction system regulations criminal provisions and criminal punishment systems are subject to special minimum and maximum proof which was found during the appellate court hearing. 2) Judge's consideration in deciding the case with register number No.4 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT.DKI with the defendant Johanes Budisutrisno Kotjo by imposing the decision based on what has been regulated in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 as well as several considerations of decisions based on the conscience of judges deemed what is regulated in the Act are not in accordance with the condition of the defendant in which during the trial had found several new facts with new evidence and consideration of a sense of justice received by the Indonesian people as a result of the actions of the defendant.

Keywords: *Burdens, Criminal Sanctions, Corruption Crimes*